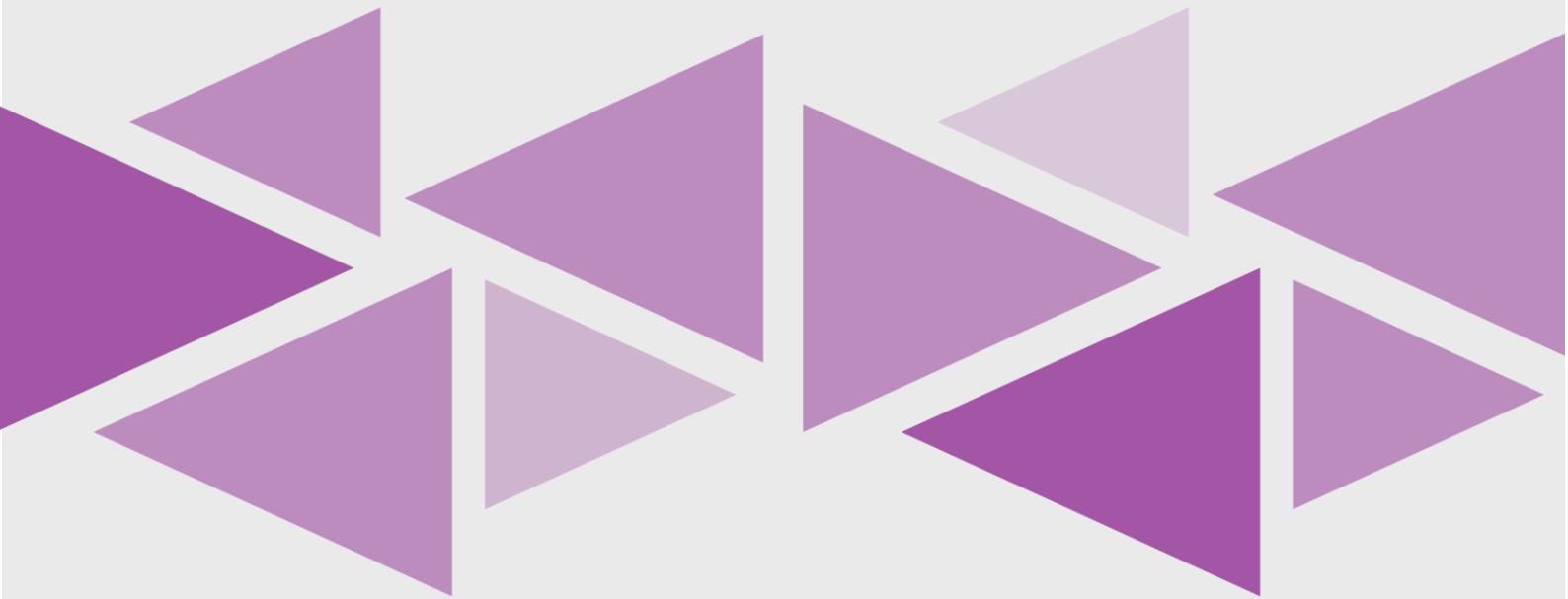




2024

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV



**DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu organisasi pemerintah yang dituntut dari tahun ketahun untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan sebuah organisasi dipengaruhi oleh ketepatan, kualitas dan transparansi penyampaian pelaporan kinerja. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai ungkapan komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan pelaksanaan

program dan kegiatan.

Akhir kata, semoga Laporan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja.

Purwakarta, 31 Desember 2024

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA



EKA SUGRIYANA, S.P, M.M

Pembina Tk.I/ IV.b

NIP. 19700407 199803 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Tujuan dan Keluaran.....	3
1.4. Ruang Lingkup.....	4

BAB II EVALUASI KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja.....	6
2.2. Capaian Kinerja.....	6

BAB III PENUTUP.....	37
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta memiliki kewajiban dan komitmen untuk menyampaikan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan yang pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, yang diwujudkan dalam Laporan Monev Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2024 Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang

bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Laporan kinerja merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan ini dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum perlunya menyusun Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan adalah berlandaskan pada:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

1.3. Tujuan dan Keluaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan

monitoring, evaluasi serta membuat pelaporan secara vertikal maupun horisontal terhadap kegiatan-kegiatan yang akan, sedang, maupun telah dilaksanakan melalui kinerja yang profesional untuk menghasilkan keluaran sesuai target yang diharapkan. Disamping itu juga memantau kinerja dan hasil kegiatan di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yang terukur melalui pelaporan monitoring dan evaluasi dengan lancar dan sistematis (bulanan, triwulan, semester, tahunan), sehingga diperoleh pelaporan monitoring dan evaluasi yang baik dan sistematis. Sasaran lain yang ingin dicapai adalah terpantauanya kinerja dan hasil kegiatan di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

Keluaran (output) yang diharapkan dari penyelenggaraan monev adalah :

1. Monitoring dan Evaluasi
2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan Tahun Anggaran 2024.
3. Laporan berkala pelaksanaan kegiatan baik Bulanan, Semester serta tahun.

1.4. Ruang Lingkup

Pelaksanaan rapat monev Triwulan IV dalam bentuk pertemuan koordinasi internal dan penyampaian laporan triwulan

oleh penanggung jawab kegiatan. Melibatkan anggota tim peneliti, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, pelaksana monev, untuk periode triwulan IV tahun anggaran 2024 ini pelaporan monev dilaksanakan secara internal oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sendiri dan tidak melibatkan evaluator dari eksternal Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

BAB II

EVALUASI KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kepala Dinas dengan Bupati Purwakarta memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 5 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja Sasaran, Program, yang dihasilkan pada tahun 2024 sampai dengan triwulan IV :

Tabel 2.1

Capaian Sasaran Kinerja

Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Triwulan IV	Tingkat Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	A	A	100	SANGAT TINGGI
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	100	SANGAT TINGGI

Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	89,7	85,92	95,78595318	SANGAT TINGGI
	Pertumbuhan UMKM	UKM	11,86	12	101,1804384	MELAMPAUI
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	Rupiah	46.782.449.072	46.782.449.072	100	SANGAT TINGGI

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program

Perangkat Daerah/bidang urusan/program /kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan I	Realisasi Kinerja Triwulan II	Realisasi Kinerja Triwulan III	Realisasi Kinerja Triwulan IV	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	A	0	A	A	A	A	100	SANGAT TINGGI
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM										
	Percentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan	%	87,5	2,86	2,86	8,57	62,86	62,86	71,84	SEDANG
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI										
	Percentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan	%	89,7	24,95	49,90	63	85,94	85,94	95,80824972	SANGAT TINGGI
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI										
	Percentase Koperasi yang berkualitas	%	89,7	15,45	15,45	63,37	85,94	85,94	95,80824972	SANGAT TINGGI
	Percentase Koperasi yang mendapatkan penghargaan hasil penilaian	%	12	0,00	0,00	12,00	12,00	12	100	SANGAT TINGGI

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN										
	Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian	%	72,82	0	11,24	66,67	72,82	72,82	100	SANGAT TINGGI
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)										
	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	85,23	0	9,21	56,67	85,23	85,23	100	SANGAT TINGGI
	Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha	%	56,46	0	0,00	0,00	56,46	56,46	100	SANGAT TINGGI
	Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha	%	75,23	0	8,41	66,57	75,23	75,23	100	SANGAT TINGGI
	Tingkat Wirausaha Baru (WUB)	%	2,53	0	1,71	1,88	2,53	2,53	100	SANGAT TINGGI
	Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan	%	57,9	0	0,00	0,00	57,90	57,90	100	SANGAT TINGGI
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM										
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	20,56	0	0	0	20,56	21	100	SANGAT TINGGI
	Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya	%	9,63	0	0	5,6	9,63	10	100	SANGAT TINGGI
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN										
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	95,32	20,52	31,89	43,26	100,00	100,00	104,9097776	MELAMPAUI
	Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan	%	100	23,33	40,00	46,67	100,00	100,00	100	SANGAT TINGGI

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									
	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	%	100	0	100	100	100	100	SANGAT TINGGI
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING									
	Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya	%	100	78,57	100	100	100	100	SANGAT TINGGI
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	37	21,50	21,50	37,00	37,00	37,00	SANGAT TINGGI
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR									
	Tingkat Nilai Export bersih	%	1	0	0	0	1	1	SANGAT TINGGI
	Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	%	2	0	0	2	2	2	SANGAT TINGGI
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI									
	Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	%	50	0	0	0	50	50	SANGAT TINGGI
	Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	%	50	0	0	0	50	50	SANGAT TINGGI

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN										
	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	64,62	6,85	13,20	18,50	31,60	32,55	50,37140204	RENDAH
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI										
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	60	20	40	60	60	60	100	SANGAT TINGGI
	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	83,33	33,33	47,46	76,19	83,33	83,33	100	SANGAT TINGGI
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA										
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	20,71	1,55	4,84	7,48	20,71	20,71	100	SANGAT TINGGI
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100	SANGAT TINGGI
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	SANGAT RENDAH

	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	100	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100	SANGAT TINGGI
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL										
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
	Diseminasi, publikasi data informasi dan analisia industri yang dilaksanakan	Kegiatan	10	0	0	0	10	10	100	SANGAT TINGGI

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang dihasilkan pada tahun 2024 sampai dengan triwulan IV :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kegiatan dsn Sub Kegiatan

Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Triwulan I	Realisasi Kinerja Triwulan II	Realisasi Kinerja Triwulan III	Realisasi Kinerja Triwulan IV	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	2	3	4	6	8	10	11	12	13	14
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	5	5	5	7	7	100	SANGAT TINGGI
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	2	3	4	4	4	100	SANGAT TINGGI
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD										
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	1	1	1	100	SANGAT TINGGI

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	1	2	3	4	4	100	SANGAT TINGGI
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	3	2	3	3	3	3	100	SANGAT TINGGI
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	3	6	9	12	12	100	SANGAT TINGGI
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD										
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	4	1	2	3	4	4	100	SANGAT TINGGI
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	2	2	2	2	100	SANGAT TINGGI

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1		1	100	SANGAT TINGGI
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										
	Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	2	0	1	1	2	2	100	SANGAT TINGGI
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah										
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	0	0	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah										
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	0	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	2	0	0	0	2	2	100	SANGAT TINGGI
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	0	1	1	100	SANGAT TINGGI

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	0	0	0	1	1	100	SANGAT TINGGI
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	0	0	0	5	5	100	SANGAT TINGGI
Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	Kegiatan	8	2	6	7	7	7	87,5	TINGGI
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Fasilitasi Kunjungan Tamu										
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	1	1	1	100	SANGAT TINGGI

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	0	0	1	2	2	100	SANGAT TINGGI
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	2	0	2	2	2	2	100	SANGAT TINGGI
Pengadaan Mebel										
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	100	SANGAT TINGGI
Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	53	13	26	39	53	53	100	SANGAT TINGGI
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	4	3	3	3	4	4	100	SANGAT TINGGI
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	7	1	2	4	7	7	100	SANGAT TINGGI
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	1	1	2	3	3	100	SANGAT TINGGI
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	1	1	2	3	3	100	SANGAT TINGGI
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1	2	3	3	3	100	SANGAT TINGGI
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota										
	Jumlah ijin usaha koperasi simpan pinjam kewenangan kabupaten yang diterbitkan	Unit Usaha	35	1	1	3	22	22	62,85714286	RENDAH

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										
	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	35	1	1	3	22	22	62,85714286	RENDAH
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota										
	Jumlah koperasi yang diperiksa dan di awasi	Unit Usaha	505	126	252	320	434	434	85,94059406	TINGGI
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi										
	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	505	126	252	320	434	434	85,94059406	TINGGI
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
	Jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang di nilai kesehatannya	Unit Usaha	505	78	78	300	434	434	85,94059406	TINGGI
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan										
	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	12	0	0	12	12	12	100	SANGAT TINGGI

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										
	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Unit Usaha	150	0	50	100	150	150	100	SANGAT TINGGI
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi										
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	150	0	50	100	150	150	100	SANGAT TINGGI
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan										
	Jumlah fasilitasi UKM dalam pemberdayaan	Unit Usaha	775	0	400	566	775	775	100	SANGAT TINGGI
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro										
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	50	0	0	50	50	50	100	SANGAT TINGGI
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro										
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	700	0	400	466	700	700	100	SANGAT TINGGI
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro										
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	25	0	0	25	25	25	100	SANGAT TINGGI
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro										
	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	25	0	0	25	25	25	100	SANGAT TINGGI

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan										
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	150	0	0	0	150	150	100	SANGAT TINGGI
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil										
	Jumlah Usaha Mikro dengan peningkatan menjadi usaha kecil	Unit Usaha	535	0	0	335	535	535	100	SANGAT TINGGI
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi										
	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	240	0	0	120	240	240	100	SANGAT TINGGI
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan										
	Jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Dokumen	1	0	0	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	2	0	1	2	2	2	100	SANGAT TINGGI

Penerbitan Tanda Daftar Gudang										
	Jumlah Penerbitan TDG	Dokumen	1	0	0	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang										
	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	1	0	0	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri										
	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Dokumen	1	0	0	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik										
	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	0	0	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri										
	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Dokumen	1	0	0	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri										
	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Dokumen	1	0	0	1	1	1	100	SANGAT TINGGI

Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)										
	Jumlah Penerbitan SKA	Dokumen	1	0	0	0		0	0	SANGAT RENDAH
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA										
	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	16444	2.356	5.634	9.134		9.134	55,54609584	RENDAH
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya										
	Jumlah Pengelola yang di bina	Orang	25	0	0	25	25	25	100	SANGAT TINGGI
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan										
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan	Dokumen	1	0	0	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										
	Jumlah Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	Komoditi	42	33	42	42	42	42	100	SANGAT TINGGI
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat										
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan BarangPenting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	1	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat										
	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan BarangPenting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	1	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI

Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota										
	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia dan harga	Komoditi	42	33	42	42	42	42	100	SANGAT TINGGI
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota										
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota										
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
	Jumlah dokumen pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	Dokumen	1	0	0	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi										
	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	1	0	0	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
	Jumlah kegiatan penyelenggaran promosi dagang melalui pameran	Kegiatan	1	0	0	1	1	1	100	SANGAT TINGGI

Pameran Dagang Nasional										
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	20	0	0	20	20	20	100	SANGAT TINGGI
Peningkatan Citra Produk Ekspor										
	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	50	0	0	50	50	50	100	SANGAT TINGGI
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri										
	Jumlah Jenis produk UMKM yang di Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan di Kabupaten	Produk	20	0	0	10	10	10	50	SANGAT RENDAH
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota										
	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Produk	10	0	0	10	20	20	200	MELAMPAUI
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota										
	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	10	0	0	0	10	10	100	SANGAT TINGGI
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan										
	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	Unit	21000	1.438	2771	4.121	6.836	6.836	32,55238095	SANGAT RENDAH
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang										
	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	21000	1438	2771	4.121	6.636	6.636	31,6	SANGAT RENDAH

Pengawasan/Penyaluhan Metrologi Legal										
	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	200	169	200	200	200	200	100	SANGAT TINGGI
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota										
	Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kegiatan	3	0	2	3	3	3	100	SANGAT TINGGI
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri										
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	0	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri										
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	0	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat										
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	0	0	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota										
	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota										
	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	0	1	1	1	1	100	SANGAT TINGGI
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota										
	Jumlah dokumen informasi Industri untuk Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	1	1	100	SANGAT TINGGI
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SII Nas										
	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SII Nas	Dokumen	1	0	0	0	1	1	100	SANGAT TINGGI

Untuk mengetahui penyerapan anggaran Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada table 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Realisasi Anggatan Triwulan IV 2024

Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	APBD Tahun Anggaran 2024	Realisasi Triwulan I Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Realisasi Triwulan III Tahun 2024	Realisasi Triwulan IV Tahun 2024	Realisasi Capaian Anggaran	Sisa Anggaran	Tingkat Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.100.717.578	4.121.023.954	6.953.384.649	10.299.835.696	13.954.714.191	13.954.714.191	1.146.003.387	92,41%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	179.322.100	6.334.000	21.487.000	89.017.000	167.577.970	167.577.970	11.744.130	93,45%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.277.300	4.204.000	10.594.000	21.188.000	65.701.970	65.701.970	11.575.330	85,02%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.311.700	0	4.204.000	5.303.000	5.303.000	5.303.000	8.700	99,84%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.069.100	0	0	0	5.054.000	5.054.000	15.100	99,70%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.198.100	2.130.000	4.204.000	5.161.000	5.161.000	5.161.000	37.100	99,29%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.007.900	0	0	0	4.978.000	4.978.000	29.900	99,40%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.561.000	0	0	47.090.000	52.550.000	52.550.000	11.000	99,98%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.897.000	0	2.485.000	10.275.000	28.830.000	28.830.000	67.000	99,77%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.995.325.676	2.864.401.699	5.111.675.477	6.765.863.286	9.116.238.805	9.116.238.805	879.086.871	91,21%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.975.325.676	2.862.981.699	5.107.051.477	6.759.004.286	9.099.306.805	9.099.306.805	876.018.871	91,22%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	1.420.000	4.624.000	4.624.000	6.984.000	6.984.000	3.016.000	69,84%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.000.000	0	0	2.235.000	9.948.000	9.948.000	52.000	99,48%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.165.700	0	0	4.734.000	9.508.000	9.508.000	2.657.700	78,15%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.632.100	0	0	0	0	0	2.632.100	0,00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.533.600	0	0	4.734.000	9.508.000	9.508.000	25.600	99,73%

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	151.556.206	0	2.754.000	90.464.000	115.866.000	115.866.000	35.690.206	76,45%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiian	9.999.600	0	0	4.510.000	9.732.000	9.732.000	267.600	97,32%	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19.999.600	0	2.754.000	2.754.000	19.894.000	19.894.000	105.600	99,47%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	121.557.006	0	0	83.200.000	86.240.000	86.240.000	35.317.006	70,95%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.535.942.900	503.474.000	681.311.650	1.009.133.150	1.517.044.150	1.517.044.150	18.898.750	98,77%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.000	0	12.494.000	24.993.000	49.999.000	49.999.000	0	100,00%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.804.000	0	0	170.804.000	170.804.000	170.804.000	0	100,00%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.993.000	0	12.219.000	24.570.000	49.993.000	49.993.000	0	100,00%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.025.966.900	451.274.000	491.798.000	605.717.000	1.009.186.900	1.009.186.900	16.780.000	98,36%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	105.290.000	0	105.290.000	105.290.000	105.290.000	105.290.000	0	100,00%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	0	6.000.000	10.000.000	18.016.000	18.016.000	1.984.000	90,08%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	52.200.000	53.510.650	67.759.150	99.871.250	99.871.250	128.750	99,87%	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.890.000	0	0	0	13.884.000	13.884.000	6.000	99,96%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	236.832.000	0	5.430.000	236.283.100	236.283.100	236.283.100	548.900	99,77%	
Pengadaan Mebel	103.192.000	0	0	103.192.000	103.192.000	103.192.000	0	100,00%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	133.640.000	0	5.430.000	133.091.100	133.091.100	133.091.100	548.900	99,59%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.812.389.296	547.739.655	912.755.222	1.206.080.509	1.650.634.975	1.650.634.975	161.754.321	91,08%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0	3.232.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	100,00%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.984.528	50.220.705	86.892.082	123.208.584	184.724.995	184.724.995	65.259.533	73,89%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.557.404.768	497.518.950	822.631.140	1.077.871.925	1.460.909.980	1.460.909.980	96.494.788	93,80%	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.177.183.700	199.074.600	217.971.300	898.260.651	1.141.561.191	1.141.561.191	35.622.509	96,97%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	0	4.314.400	19.346.260	50.000.000	50.000.000	30.000.000	62,50%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.718.100	0	132.300	9.636.100	39.901.900	39.901.900	816.200	98,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.550.000	0	6.150.000	15.350.000	24.550.000	24.550.000	0	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.031.915.600	199.074.600	207.374.600	853.928.291	1.027.109.291	1.027.109.291	4.806.309	99,53%
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	50.000.000	0	16.811.500	16.811.500	17.472.000	17.472.000	32.528.000	34,94%
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	0	16.811.500	16.811.500	17.472.000	17.472.000	32.528.000	34,94%
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	0	16.811.500	16.811.500	17.472.000	17.472.000	32.528.000	34,94%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	125.000.000	0	660.000	50.860.000	83.586.600	83.586.600	41.413.400	66,87%
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	0	660.000	50.860.000	83.586.600	83.586.600	41.413.400	66,87%
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	125.000.000	0	660.000	50.860.000	83.586.600	83.586.600	41.413.400	66,87%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	200.000.000	0	0	173.433.400	188.883.400	188.883.400	11.116.600	94,44%
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	0	0	173.433.400	188.883.400	188.883.400	11.116.600	94,44%
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	200.000.000	0	0	173.433.400	188.883.400	188.883.400	11.116.600	94,44%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	189.707.600	0	17.869.500	81.821.000	189.607.500	189.607.500	100.100	99,95%

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	189.707.600	0	17.869.500	81.821.000	189.607.500	189.607.500	100.100	99,95%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	189.707.600	0	17.869.500	81.821.000	189.607.500	189.607.500	100.100	99,95%
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.060.882.816	0	9.270.500	42.665.400	735.397.270	735.397.270	325.485.546	69,32%
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.060.882.816	0	9.270.500	42.665.400	735.397.270	735.397.270	325.485.546	69,32%
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	68.036.000	0	1.916.000	1.916.000	8.956.000	8.956.000	59.080.000	13,16%
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	270.270.400	0	0	23.002.900	23.002.900	23.002.900	247.267.500	8,51%
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	599.992.300	0	0	0	598.284.370	598.284.370	1.707.930	99,72%
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	50.302.616	0	7.354.500	17.746.500	37.738.500	37.738.500	12.564.116	75,02%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	72.281.500	0	0	0	67.415.500	67.415.500	4.866.000	93,27%
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	538.157.690	0	46.578.600	46.578.600	514.897.050	514.897.050	23.260.640	95,68%
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	538.157.690	0	46.578.600	46.578.600	514.897.050	514.897.050	23.260.640	95,68%
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	538.157.690	0	46.578.600	46.578.600	514.897.050	514.897.050	23.260.640	95,68%
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	129.437.400	0	52.819.400	52.819.400	95.169.400	95.169.400	34.268.000	73,53%
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	64.439.400	0	49.439.400	49.439.400	49.439.400	49.439.400	15.000.000	76,72%
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	64.439.400	0	49.439.400	49.439.400	49.439.400	49.439.400	15.000.000	76,72%

Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.000.000	0	3.380.000	3.380.000	8.120.000	8.120.000	6.880.000	54,13%
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.000.000	0	3.380.000	3.380.000	8.120.000	8.120.000	6.880.000	54,13%
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	15.000.000	0	0	11.810.000	15.000.000	15.000.000	0	100,00%
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	15.000.000	0	0	11.810.000	15.000.000	15.000.000	0	100,00%
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	14.998.000	0	0	14.998.000	14.998.000	14.998.000	0	100,00%
Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	14.998.000	0	0	14.998.000	14.998.000	14.998.000	0	100,00%
Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	20.000.000	0	0	0	7.612.000	7.612.000	12.388.000	38,06%
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	20.000.000	0	0	0	7.612.000	7.612.000	12.388.000	38,06%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	100,00%
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	100,00%
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	100,00%
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	259.545.400	0	65.380.500	192.130.500	208.825.000	208.825.000	50.720.400	80,46%
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	29.999.200	0	8.993.500	8.993.500	9.733.500	9.733.500	20.265.700	32,45%
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	14.999.600	0	4.280.500	4.280.500	4.280.500	4.280.500	10.719.100	28,54%
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	14.999.600	0	4.713.000	4.713.000	5.453.000	5.453.000	9.546.600	36,35%
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	214.547.600	0	56.387.000	183.137.000	188.419.500	188.419.500	26.128.100	87,82%

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	14.549.600	0	5.569.000	5.569.000	10.851.500	10.851.500	3.698.100	74,58%
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	199.998.000	0	50.818.000	177.568.000	177.568.000	177.568.000	22.430.000	88,78%
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.998.600	0	0	0	10.672.000	10.672.000	4.326.600	71,15%
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	14.998.600	0	0	0	10.672.000	10.672.000	4.326.600	71,15%
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	178.790.000	0	49.900.000	49.900.000	175.510.000	175.510.000	3.280.000	98,17%
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	178.790.000	0	49.900.000	49.900.000	175.510.000	175.510.000	3.280.000	98,17%
Pameran Dagang Nasional	78.890.000	0	0	0	76.260.000	76.260.000	2.630.000	96,67%
Peningkatan Citra Produk Ekspor	99.900.000	0	49.900.000	49.900.000	99.250.000	99.250.000	650.000	99,35%
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	90.000.000	0	0	0	84.000.000	84.000.000	6.000.000	93,33%
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	90.000.000	0	0	0	84.000.000	84.000.000	6.000.000	93,33%
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000	0	0	0	49.500.000	49.500.000	500.000	99,00%
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40.000.000	0	0	0	34.500.000	34.500.000	5.500.000	86,25%
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	275.000.000	19.480.000	105.018.900	135.431.700	233.193.800	233.193.800	41.806.200	84,80%

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	275.000.000	19.480.000	105.018.900	135.431.700	233.193.800	233.193.800	41.806.200	84,80%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	200.000.000	17.266.000	71.673.500	94.886.900	181.025.700	181.025.700	18.974.300	90,51%
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	75.000.000	2.214.000	33.345.400	40.544.800	52.168.100	52.168.100	22.831.900	69,56%
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	849.953.000	82.400.000	425.050.000	593.823.300	806.549.700	806.549.700	43.403.300	94,89%
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	849.953.000	82.400.000	425.050.000	593.823.300	806.549.700	806.549.700	43.403.300	94,89%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	150.000.000	0	49.801.000	74.546.800	142.765.600	142.765.600	7.234.400	95,18%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	149.971.000	0	81.169.000	143.876.500	143.876.500	143.876.500	6.094.500	95,94%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	549.982.000	82.400.000	294.080.000	375.400.000	519.907.600	519.907.600	30.074.400	94,53%
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	49.974.000	0	26.614.000	26.614.000	49.974.000	49.974.000	0	100,00%
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	49.974.000	0	26.614.000	26.614.000	49.974.000	49.974.000	0	100,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	49.974.000	0	26.614.000	26.614.000	49.974.000	49.974.000	0	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	149.986.000	0	0	0	149.318.400	149.318.400	667.600	99,55%
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	149.986.000	0	0	0	149.318.400	149.318.400	667.600	99,55%
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	149.986.000	0	0	0	149.318.400	149.318.400	667.600	99,55%
Jumlah	19.267.151.484	4.222.903.954	7.769.357.549	11.762.724.496	17.507.098.311	17.507.098.311	1.760.053.173	90,87%

BAB III

PENUTUP

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Triwulan IV Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja

kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pada Triwulan IV.

Purwakarta, 31 Desember 2024

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA



EKA SUGRIYANA, S.P, M.M

Pembina Tk.I/ IV.b

NIP. 19700407 199803 1 008